

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO**

Oleh:

**Nuraini Rahayu¹
Herman Karamoy²
Winston Pontoh³**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manadoemail: ¹ rani_041289@ymail.com² h.karamoy@yahoo.com³ winston_pontoh@yahoo.com**ABSTRAK**

Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara merupakan manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca. Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara dapat memenuhi kebutuhan manajerial serta pertanggungjawaban sekaligus. Objek dalam penelitian adalah pada Pengadilan Tinggi Agama Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan melihat perlakuan akuntansi yang diterapkan, apakah sudah sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Barang Milik Negara dan untuk mengetahui apakah Laporan yang dihasilkan dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara Pengadilan Tinggi Agama Manado telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, dengan Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Manado telah diterapkan dengan baik dan tertib dan sudah sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Barang Milik Negara. Laporan yang dihasilkan dari Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Manado telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dibuktikan dengan adanya informasi yang lengkap dan andal untuk disajikan pada Laporan BMN.

Kata kunci: sistem informasi akuntansi, akuntansi sektor publik, barang milik negara.

ABSTRACT

Accounting Information System of State Assets is a Assets management with a responsibility report of State Revenue and Expenditure Budget in a balance form. It is able to fulfill managerial requirements as well. The object of this study is High Religious Court of Manado. This study is aimed at finding out the application of Accounting Information System of State Assets in Manado Religious High Court by analyzing the accounting treatment which is applied and to know whether or not the accounting treatment is suitable with the accounting policy of state assets. Further, it aims to know whether or not the accounting information system of state assets report fulfilled the qualitative characteristics of financial statement. The method used in this study is descriptive analysis. This study shows that the application of Accounting Information System of State Assets in Manado Religious High Court has been applied appropriately based on the accounting policy of state assets. Moreover, the report of accounting information system has been fulfilled the qualitative characteristics of financial statement based on the government regulation number 71 year 2010 which is about the Standard of Government Accounting. It is proved by the availability of information in the state assets report.

Keywords: accounting information system, accounting public sector, state assets.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan lingkungan strategik nasional berupa tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi sistem sosial, politik dan ekonomi untuk mewujudkan demokrasi telah mengubah sistem dan struktur pemerintahan Indonesia. Transparansi fiskal merupakan komponen utama terhadap terciptanya *clean government* dan *good governance*. Berkaitan dengan hal tersebut, akuntansi pemerintahan yang erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara secara praktis berperan penting dalam tercapainya tujuan yang diharapkan.

Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara yang merupakan pengembangan dari Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi selain Sistem Akuntansi Keuangan disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang pernah atau yang memang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada bagian atau seksi perlengkapan/ rumah tangga atau yang semacamnya sehingga sesuai Struktur Unit Akuntansi Barang melekat untuk penyusunan laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara dan SAK sebagai sub sistem harus saling berjalan secara simultan. Dengan demikian dapat dilakukan *check and balance* antara arus uang dan arus barang.

Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai suatu organisasi yang menggunakan pembiayaan APBN harus mampu mengelola keuangan Negara secara efektif dan efisien sebagai wujud pertanggungjawaban publiknya. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Manado telah menerapkan sistem informasi akuntansi terhadap Barang Milik Negara, oleh karena itu penulis tertarik melakukan peninjauan dan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Manado.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan melihat perlakuan akuntansi yang diterapkan, apakah sudah sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Barang Milik Negara dan untuk mengetahui laporan yang dihasilkan dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Manado telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Halim (2008:143-145) menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan suatu kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bastian (2007:118), menyatakan bahwa kelompok organisasi sektor publik dapat dibagi dalam :

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Badan Umum Non Departemen
5. Yayasan
6. Koperasi
7. Perkumpulan/Asosiasi, seperti organisasi KADIN (Konsul Dagang dan Industri) dan Ikatan Akuntansi Indonesia.

Definisi Sistem Informasi Akuntansi

Hall (2008:11) dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi yang telah dialihbahasakan oleh Thomson Learning mendefinisikan Sistem informasi akuntansi terdiri atas catatan-catatan dan metode yang digunakan untuk memulai, mengidentifikasi, menganalisis, dan mencatat transaksi organisasi untuk memperhitungkan aktiva dan kewajiban terkait.

Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam sistem
2. Memproses data transaksi
3. Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang
4. Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan, atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di computer.
5. Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan aset bersejarah. Aset lancar yang dimaksud dalam pengertian BMN adalah persediaan.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan
- b. Konsistensi
- c. Dapat dibandingkan
- d. Materialitas
- e. Obyektif
- f. Kelengkapan

Karakter Kualitatif Laporan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu sebagai berikut.

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan;
Dapat dipahami.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan menurut PP Nomor 60 Tahun 2008.

Sistem Pengendalian Internal adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Mahmudi (2011 : 252) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, menyatakan tujuan SPIP adalah :

1. Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data.
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat.
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal.

4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/ SAP) .
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal Memiliki 3 fungsi :
 1. Pengendalian Preventif.
 2. Pengendalian Detektif
 3. Pengendalian Korektif

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Ariyanti (2007) berjudul: Tinjauan Atas Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) pada Kanwil XIII DJPBN Semarang Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Hasil penelitian tersebut bahwa Kanwil XIII DJPBN Semarang prosedur Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah menerapkan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) sesuai dengan prosedur yang ada. Penelitian Nurhayati (2008) berjudul: Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Karakteristik Kualitas Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (Survey pada Kementerian Keuangan di Unit Wilayah Propinsi Jawa Barat), dikemukakan bahwa peningkatan penerapan SAI dan SAKIP akan diikuti dengan peningkatan kualitas dari penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian dengan studi kasus pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Manado Jl.17 Agustus No.46 A Manado, Sulawesi Utara dan waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2013 sampai dengan selesainya skripsi ini.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendefinisikan dan merumuskan masalah
2. Melakukan studi kepustakaan, mengacu pada teori yang berlaku dan dapat dicari atau ditemukan pada buku-buku atas penelitian orang lain.
3. Mengumpulkan data sesuai kebutuhan terkait penelitian
4. Mengolah dan menyajikan informasi
5. Menganalisis dan menginterpretasikan
6. Membuat kesimpulan

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif sebagai dasar untuk menganalisis sistem informasi akuntansi barang milik negara kemudian dievaluasi apakah sesuai dengan karakter kualitatif laporan keuangan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai objek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature serta referensi yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data yang diperoleh dari tulisan-tulisan ilmiah yang ada maupun buku-buku literatur lain yang diperlukan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang intern pada perusahaan yang bersangkutan. Data yang diambil sebagian besar diperoleh dengan teknik pengumpulan sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan serangkaian pengamatan langsung dikantor Pengadilan Tinggi Agama Manado.
 - b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak atau bagian-bagian yang berwenang dalam perusahaan tersebut yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan - catatan yang dimiliki satuan kerja. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, catatan, dan penerapan sistem informasi akuntansi barang milik negara.

Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini yaitu Metode Analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara Pengadilan Tinggi Agama Manado.

Penanggung Jawab SIMAK BMN

Penanggung jawab BMN yang disebut juga dengan Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yaitu Panitera/ Sekretaris yang membawahi Kepala Sub.bagian umum memiliki tugas yaitu : Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) satuan kerja dengan Sistem Akuntansi Intansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yaitu Panitera/Sekretaris yang membawahi Kepala Sub. Bagian keuangan serta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu, menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada UAPPA-W yaitu Pengadilan Tinggi Manado untuk DIPA 01 dan Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk DIPA 04 yang merupakan Koordinator Wilayah yang ditunjuk langsung oleh Mahkamah Agung RI dan UAPPA-E1 yaitu Sekretarsi Mahkamah Agung RI untuk DIPA 01 dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk DIPA 04 beserta ADK secara tepat waktu, bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai standar Akuntansi Pemerintah, serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama manado. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf.

Jenis-jenis Transaksi dalam Akuntansi Barang Milik Negara

Jenis Transaksi Akuntansi BMN yang dicatat meliputi tiga jenis, yaitu perolehan, perubahan dan Penghapusan.

Saldo awal merupakan saldo barang milik negara pada tahun anggaran berjalan atau awal tahun mulai diimplementasikannya Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara yang merupakan akumulasi dari seluruh transaksi barang milik negara tahun sebelumnya.

- a. Transaksi perolehan BMN meliputi :
 - 1) Pembelian, merupakan transaksi perolehan BMN dari hal pembelian
 - 2) Transfer masuk, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari UAKPB

- 3) Hibah, merupakan transaksi perolehan dari hasil penerimaan pihak ketiga/pemerintah daerah (diluar entitas pelaporan)
 - 4) Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan
 - 5) Penyelesaian pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan berita acara serah terima
 - 6) Pembatalan penghapusan, merupakan pencatatan BMN dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dilepaskan/dikeluarkan dari pembukuan
 - 7) Reklasifikasi masuk, merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain
- b. Transaksi perubahan BMN meliputi :
- 1) Pengurangan kuantitas/nilai, merupakan transaksi pengurangan kuantitas/nilai BMN yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan barang milik negara hilang.
 - 2) Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari BI Ekstrakomptabel ke BI Intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan BMN dalam BI Intrakomptabel
 - 3) Perubahan kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN.
 - 4) Koreksi perubahan nilai/kuantitas, merupakan koreksi pencatatan atas nilai yang telah dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya.
- c. Transaksi penghapusan BMN meliputi :
- 1) Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang
 - 2) Transfer keluar, merupakan transaksi penyerahan BMN ke UAKPB lain
 - 3) Hibah, merupakan transaksi penyerahan BMN kepada pihak ketiga/pemerintah daerah (diluar entitas pelaporan)
 - 4) Reklasifikasi keluar, merupakan transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN yang lain. transaksi ini berkaitan dengan transaksi reklasifikasi masuk
 - 5) Koreksi pencatatan, merupakan transaksi untuk mengubah catatan BMN yang telah dilaporkan sebelumnya.

Proses Sistem Informasi Akuntansi BMN-Pengadilan Tinggi Agama Manado (UAKPB)

- a. Proses Bulanan dan Semesteran
- 1) Membukukan data transaksi BMN ke dalam BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, Buku Barang Bersejarah, Buku Persediaan (manual) dan Kartu Konstruksi Dalam Pengerjaan (manual) berdasarkan dokumen sumber
 - 2) Membuat dan memutakhirkan KIB, DBR, dan DBL
 - 3) Membuat Laporan BMN pada akhir semester
 - 4) Meminta pengesahan Panitera/ Sekretaris selaku Penanggungjawab UAKPB atas Laporan BMN
 - 5) Menyampaikan (mengirim) data transaksi BMN ke Unit Akuntansi Keuangan (aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya untuk penyusunan neraca tingkat Pengadilan Tinggi Agama Manado selaku UAKPA). Penyampaian ADK ke UAKPA (Aplikasi SAKPA) untuk bulan Juni dan Desember dilengkapi pula dengan Catatan Ringkas BMN yang antara lain berisi kemungkinan masih adanya barang-barang yang bermasalah seperti tidak dimasukkannya item BMN tertentu ke dalam aplikasi karena tabel barangnya belum mampu menampung nama barang tersebut meskipun sudah didekatkan dengan nama barang lain yang sudah ada dalam tabel. Barang-barang yang belum jelas status kepemilikannya seperti penerimaan hibah yang belum ada BASTnya, penambahan nilai asset yang mencapai jumlah melebihi kapitalisasi atas BMN pihak lain juga harus diungkapkan. Catatan ini akan melengkapi CALK pada UAKPA.
 - 6) Menyampaikan Laporan Persediaan dan BMN kepada UAKPA untuk dibukukan pada akhir semester
 - 7) Menyampaikan Laporan BMN berupa ADK dan Berita Acara Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya suatu semester
 - 8) Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib
 - 9) Melakukan Update data BMN di Website resmi PTA Manado untuk transparansi public.

- b. Proses Akhir Periode Akuntansi
1. Menginstruksikan kepada setiap penanggungjawab ruangan untuk melakukan pengecekan ulang kondisi BMN yang berada di ruangan masing-masing.
 2. Mencatat perubahan kondisi BMN yang telah disahkan oleh Penanggungjawab ruangan ke dalam aplikasi
 3. Membuat Laporan Kondisi Barang (LKB)
 4. Membuat Laporan BMN Tahunan berdasarkan saldo BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, dan Buku Barang Bersejarah.
 5. Meminta persetujuan kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Manado atas laporan BMN
 6. Menyampaikan Laporan BMN Tahunan dan LKB beserta ADK ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran
 7. Mengarsipkan BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, dan Buku Barang Bersejarah, salinan LKB, dan salinan Laporan BMN secara tertib
 8. Melakukan proses *back up* data dan tutup tahun
 9. Melakukan Update data BMN di Website resmi PTA Manado untuk transparansi public.

Keluaran/laporan yang dihasilkan dari Sistem Informasi Akuntansi BMN tingkat Pengadilan Tinggi Agama Manado antara lain meliputi :

- a. Buku Inventarisasi (BI) Ekstrakomptabel;
- b. Buku Inventarisasi (BI) Intrakomptabel;
- c. Buku Barang Bersejarah;
- d. Laporan Persediaan;
- e. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- f. Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah;
- g. Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung;
- h. Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor;
- i. Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan;
- j. Daftar Barang Ruangan (DBR);
- k. Laporan BMN Semesteran;
- l. Laporan BMN Tahunan;
- m. Laporan Kondisi Barang (LKB)

Pengendalian Internal SIMAK BMN Pengadilan Tinggi Agama Manado.

Untuk melindungi aset-aset Negara dan mencegah dari kerugian /korupsi serta keakuratan data keuangan PTA Manado melakukan pengendalian internal antara lain :

1. Menggunakan kata sandi (password) untuk mencegah individu lain memiliki akses format data *entry* dan laporan yang tidak diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka.
2. Melakukan opname fisik persediaan rutin setiap bulannya dan opname fisik Aset tetap setiap akhir tahun, untuk mengetahui saldo yang tercantum pada SIMAK BMN sesuai fisiknya.
3. Melakukan back up data dikomputer maupun di media lain seperti flash disk, maupun hardisk eksternal untuk mewaspadai jika computer yang digunakan untuk SIMAK BMN terkena virus atau kerusakan data lainnya.
4. Melakukan opname fisik barang setiap akhir tahun dan mencetak DBR (Daftar Barang Ruangan) dan diletakkan di setiap ruangan, untuk mengontrol barang-barang yang ada.
5. Melakukan opname fisik persediaan dan pencatatan aplikasi untuk melihat keakuratan data, serta membuat buku persediaan dan kartu barang untuk mengontrol persediaan yang masuk dan keluar setiap waktu.
6. Mengarsip dokumen-dokumen transaksi perolehan Barang Milik Negara ke dalam Map sesuai dengan jenisnya untuk menjaga keakuratan data.

Pembahasan

Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara

Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado telah sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu: ketaatan, konsistensi, Kemampubandingan, Materialitas, objektif, dan kelengkapan. Untuk pencatatan aset kedalam Aplikasi SIMAK-BMN pencatatan akan dilakukan jika barang telah diterima oleh penerima barang dan akan di input ke dalam sistem jika didukung dengan bukti SPM dan SP2D, sedangkan untuk penilaian aset di PTA Manado sebagian besar menggunakan nilai perolehan yaitu harga pembelian ditambah dengan PPN, meskipun dalam teori dapat juga dipakai nilai taksiran jika aset diterima dalam bentuk Hibah atau pemberian. Untuk pemberian NUP (Nomor Urut pendaftaran) aset PTA telah menerapkan hal tersebut setiap kali aset diterima, namun ada saja aset yang dipindahkan sehingga BMN yang ada tidak sesuai dengan daftar barang ruangan, sehingga hal ini membuat lemahnya pengawasan atas BMN tersebut. Untuk BMN yang dalam kondisi rusak berat yang tercatat dalam SIMAK-BMN akan langsung diusulkan untuk dihapus agar tidak mengganggu penyusunan anggaran nantinya.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu Aryanti, (2007) yaitu Tinjauan atas Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) pada Kanwil XIII DJPBN Semarang, penelitian kali ini lebih menerangkan secara rinci prosedur yang telah dilaksanakan PTA Manado pada SIMAK-BMN yang merupakan pembaharuan dari SABMN dimana pada SIMAK-BMN permasalahan yang ada lebih kompleks dan data yang tersaji dalam sistem haruslah cermat dan akurat sehingga sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk menilai seberapa besar kesesuaian antara penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan konsep laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini, maka *output* yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi yang ada dibandingkan dengan beberapa indikator yang merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu :

a. Relevan

Laporan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Manado telah memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna yaitu

1) Memiliki manfaat umpan balik

Laporan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Manado memungkinkan Kuasa Pengguna Barang untuk menegaskan atau mengoreksi kesalahan di masa lalu

2) Memiliki manfaat prediktif

Dengan adanya laporan BMN maka KPB dapat memprediksi barang-barang yang akan di adakan dalam kegiatan pengadaan barang yang akan dilaksanakan pada masa depan

3) Tepat waktu

Laporan BMN sudah disajikan tepat waktu sesuai, sehingga dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan

4) Lengkap

Laporan BMN sudah mencakup seluruh transaksi yang BMN yang terjadi.

b. Andal

Informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Manado sudah memenuhi karakteristik andal yaitu sebagai berikut.

1) Penyajian jujur

Laporan BMN yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Manado sudah menggambarkan keseluruhan transaksi yang terjadi dan disajikan secara wajar.

2) Dapat diverifikasi

Informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara dapat diuji kembali, dan hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh dengan informasi yang dihasilkan pertama

3) Netralitas

Informasi yang dihasilkan di arahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu

c. Dapat dibandingkan

Laporan BMN yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara Pengadilan Tinggi Agama Manado dapat dibandingkan antar periode akuntansi dan mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi yaitu mutasi bertambah dan berkurang

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan oleh Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara dapat dipahami oleh pengguna.

Laporan yang dihasilkan dari Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Manado telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dibuktikan dengan adanya informasi yang lengkap dan andal untuk di sajikan pada Laporan BMN.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dilakukan oleh PTA Manado telah dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan sehingga tujuan dari SPIP seperti melindungi aset Negara dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan andal telah terpenuhi dan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008.
2. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Manado telah diterapkan dengan baik dan tertib sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu Prinsip Ketaatan, Konsistensi, dapat dibandingkan, materialitas, obyektif, dan Kelengkapan.
3. Laporan yang dihasilkan dari Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Manado telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dibuktikan dengan adanya informasi yang lengkap dan andal untuk di sajikan pada Laporan BMN.

Saran

Saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Manado, sudah baik dan tertib di pertahankan, sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan kekayaan negara yang ada pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Manado bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi mereka yang berada pada sub bagian Umum, tetapi juga untuk semua pegawai yang ada di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Manado. Untuk itu diharapkan adanya kerja sama yang baik antar pegawai yang ada dan sumber daya yang ada lebih di tingkatkan dalam pengelolaan kekayaan Negara

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, 2007. *Tinjauan atas Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) pada Kanwil XIII DJPBN Semarang*. Universitas Negeri Semarang. <http://www.scribd.com/doc/91466299/Tinjauan-Atas-Pelaksanaan-Sistem-Akuntansi-Barang-Milik-Negara-SABMN-Pada-KANWIL-XIII-DJPBN-Semarang>. Diakses, 20 November 2013. Hal. 35-36.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. (www.bpkp.go.id).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat*. (www.kemenkeu.go.id).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*(www.kemenkeu.go.id).
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Hall, A. James. 2008. *Accounting Information System* (8th ed.). Prentice Hall, New Jersey.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik* , Edisi Pertama, Penerbit UII Press: Yogyakarta.
- Nurhayati. 2008. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Karakteristik Kualitas Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (Survey pada Kementerian Keuangan di Unit Wilayah Propinsi Jawa Barat)* Universitas Paramadina. Tanggal akses : 20 November 2013, [http://www.scribd.com/doc/91477299/Pengaruh-Penerapan-Sistem-Akuntansi-Instansi-\(SAI\)-dan-Sistem-Akuntabilitas-Kinerja-Instansi-Pemerintah-\(Sakip\)Terhadap-Karakteristik-Kualitas-Penyajian-Laporan-Pertanggungjawaban-Pelaksanaan-Anggaran](http://www.scribd.com/doc/91477299/Pengaruh-Penerapan-Sistem-Akuntansi-Instansi-(SAI)-dan-Sistem-Akuntabilitas-Kinerja-Instansi-Pemerintah-(Sakip)Terhadap-Karakteristik-Kualitas-Penyajian-Laporan-Pertanggungjawaban-Pelaksanaan-Anggaran). Diakses, 20 November 2013. Hal. 28-29.

